

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CXLIV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	150	
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIULAK GEDANG
3.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | INSTALASI FARMASI KABUPATEN KERINCI | APOTEKER
4.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | INSTALASI FARMASI
5.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SEMURUP
6.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TAMIAI
7.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
8.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
9.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | INSTALASI FARMASI
10.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
11.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BUKIT KERMAN
12.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG | TEBING TINGGI
13.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN ANAK
14.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN KEBIDANAN
15.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG | KOTO TUO UJUNG PASIR
16.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN KEBIDANAN
17.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | POLI KLINIK
18.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIULAK DERAS
19.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN ANAK
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN ANAK
21.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | LABORATORIUM
22.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN INTERNE
23.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT RADIOLOGI

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
24.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GUNUNG LABU
25.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS JUJUN
26.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
27.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
28.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PELOMPEK
29.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIULAK GEDANG
30.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIULAK DERAS
31.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KEMANTAN
32.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN INTERNE
33.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MUARA HEMAT
34.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
35.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LOLO
36.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
37.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TAMIAI
38.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BUKIT KERMAN
39.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KERSIK TUO
40.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS JUJUN
41.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
42.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
43.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SEMERAP
44.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
45.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LOLO
46.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TARUTUNG
47.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | POLI KLINIK
48.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
49.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
50.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | KASI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA
51.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT FISIOTRAPI
52.	FISIOTERAPIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT FISIOTRAPI
53.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
54.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
55.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KEMANTAN
56.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG IGD
57.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			KESEHATAN | PUSKESMAS SIULAK GEDANG
58.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG | KOTO PETAI
59.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN INTERNE
60.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
61.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BUKIT KERMAN | POSKESDES DESA AIR MUMU
62.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG | BUNGA TANJUNG
63.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KEMANTAN | PUSKESMAS PEMBANTU AIR HANGAT
64.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | POLI KLINIK
65.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PELOMPEK
66.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG | CUPAK
67.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DEPATI VII KOTO TUO | PUSTU BELUI TINGGI
68.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MUARA HEMAT
69.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR | PUSTU MASGO
70.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN ANAK
71.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG | PUSKESMAS PEMBANTU PUNGUT MUDIK
72.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG PERAWATAN INTERNE
73.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
74.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | LAB. KES DAERAH KAB. KERINCI | KEPALA LABKESDA
75.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PSC119KABUPATEN KERINCI | KOORDINATOR PSC | PENANGUNG JAWAB PELAYANAN
76.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | RUANG IGD
77.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BUKIT KERMAN | POSKESDES DESA AIR MUMU
78.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DEPATI VII KOTO TUO | PUSTU BELUI TINGGI
79.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | POLI KLINIK
80.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MUARA HEMAT | PUSTU BATANG MERANGIN
81.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG | PUSKESMAS PEMBANTU BARU SUNGAI ABU
82.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT PEREKAM MEDIS
83.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SEMURUP
84.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SEMERAP
85.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
86.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TARUTUNG
87.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PELOMPEK
88.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			KESEHATAN | PUSKESMAS GUNUNG LABU
89.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
90.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT PEREKAM MEDIS
91.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KEMANTAN
92.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIULAK MUKAI
93.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
94.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS JUJUN
95.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
96.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TAMIAI
97.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DEPATI VII KOTO TUO
98.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
99.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LOLO
100.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TAMIAI
101.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SEMERAP
102.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS JUJUN
103.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | LAB. KES DAERAH KAB. KERINCI | KEPALA LABKESDA
104.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GUNUNG LABU
105.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | LABORATORIUM
106.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DEPATI VII KOTO TUO
107.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
108.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
109.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT RADIOLOGI
110.	RADIOGRAFER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT RADIOLOGI
111.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR SERTA KESEHATAN JIWA
112.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HIANG
113.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | KASI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA
114.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | UNIT SANITARIAN
115.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LOLO
116.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS JUJUN
117.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DEPATI VII KOTO TUO
118.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KERSIK TUO
119.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LOLO
120.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIMPANG TUTUP

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
121.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GUNUNG LABU
122.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SEMERAP
123.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS PELOMPEK
124.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | POLI KLINIK
125.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BUKIT KERMAN
126.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
127.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LEMPUR
128.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DEPATI VII KOTO TUO
129.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SIULAK MUKAI
130.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | RSUD BUKIT KERMAN | UNIT UNIT NON STRUKTURAL | POLI KLINIK
131.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KERSIK TUO
132.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MUARA HEMAT

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		300	
1.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	4	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA
2.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
3.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI SYARIAH ; D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA ; D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA ; D-IV PARIWISATA BAHARI ; S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM ; D-IV SENI PERTUNJUKAN ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 HUKUM ; S-1 KONSERVASI SENI ; S-1 SENI RUPA ; S-1 SEJARAH SENI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
5.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN KOPETENSI APARATUR
6.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | SEKRETARIAT DPRD | BIDANG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
7.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA BERKELANJUTAN	8	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR | BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
8.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	8	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
9.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG TANGGAP DARURAT DAN BINA JASA KONSTRUKSI
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 BIMBINGAN KONSELING ISLAM	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
12.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI, DAN PELAPORAN
13.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG ANGGARAN
14.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BMD
15.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PBB DAN DANA TRANSFER
16.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1	4	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		STATISTIKA		PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PEREBENDAHARAAN
17.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG TANAMAN PANGAN
18.	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN ; D-IV ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI NIAGA ; D-IV ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA
19.	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 BIOLOGI ; S-1 DESAIN PRODUK ; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 FISIKA ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 KIMIA ; S-1 LOGISTIK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SAINS PERIKANAN ; S-1 SAINS PERTANIAN ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK LOGISTIK ; S-1 TEKNIK MANUFAKTUR ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN
20.	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV EKONOMI ; D-IV GEODESI ; D-IV GEOGRAFI ; D-IV ILMU TANAH ; D-IV KIMIA ; D-IV PERTANIAN ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK PENGAIRAN ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG PRASARANA DAN SARANA
21.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN KOPETENSI APARATUR
22.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, MUTASI DAN PENSIUN
24.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI ; S-1 KEARSIPAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | KECAMATAN DALAM KEBUPATEN KERINCI | KECAMATAN TANAH COGOK | SEKRETARIS KECAMATAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ANIMASI ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV DESAIN MEDIA ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ANIMASI ; D-IV DESAIN MEDIA ; D-IV DESAIN MODE ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KIMIA TERAPAN ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN ; D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ARKEOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR LANSKAP ; S-1 ASTRONOMI ; S-1 BAHASA ARAB ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 BIOINFORMATIKA ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BIOKIMIA ; S-1 BIOLOGI TERAPAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 FISIKA ; S-1 FOTOGRAFI ; S-1 FILSAFAT ; S-1 FILM ; S-1 FILM DAN TELEVISI ; S-1 GEOFISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 GEOLOGI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA ; S-1 ILMU BIOMEDIS ; S-1 ILMU EKONOMI ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU SEJARAH ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 INFORMATIKA KESEHATAN ; S-1 INFORMATIKA MEDIS ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KEUANGAN ISLAM ; S-1 KIMIA ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 KONSERVASI BIOLOGI ; S-1 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ; S-1 KRIMINOLOGI ; S-1 LINGUISTIK INDONESIA ; S-1 LINGUISTIK TERAPAN BAHASA INGGRIS ; S-1 LOGISTIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL ; S-1 MANAJEMEN HUTAN ; S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ; S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI ; S-1 PARIWISATA ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ; S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN JASMANI ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA ; S-1 PENDIDIKAN KIMIA ; S-1 PENDIDIKAN KRIYA ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN MUSIK ; S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ;		HIDUP | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		S-1 PETERNAKAN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SEJARAH ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK GEOFISIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR		
27.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SASTRA JEPANG ; D-IV KEARSIPAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
28.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ANIMASI ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV DESAIN MEDIA ; D-IV DESAIN MODE ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
30.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | SEKRETARIS | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
31.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ANIMASI ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
34.	ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	8	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | BIDANG OLAHRAGA
35.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
36.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
37.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI	8	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
38.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 HUKUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
39.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
40.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN		SEKRETARIS DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BMD
41.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
42.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV RELASI INDUSTRI ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA | BIDANG KETENAGAKERJAAN
43.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
44.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA
45.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 DESAIN INTERIOR ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ETNOMUSIKOLOGI ; S-1 FILM DAN TELEVISI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 KIMIA ; S-1 KRIYA SENI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SENI PERTUNJUKAN ; S-1 TATA KELOLA SENI	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN
46.	PAMONG BUDAYA TERAMPIL	D-III ILMU KOMUNIKASI ; D-III AKUNTANSI ; D-III DESAIN INTERIOR ; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-III FOTOGRAFI ; D-III KOMUNIKASI BROADCASTING ; D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III SENI PERTUNJUKAN ; D-III SENI TARI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK SIPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN
47.	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III HYGIENE PANGAN ; D-III KESEHATAN HEWAN ; D-III KESEHATAN TERNAK ; D-III PARAMEDIK VETERINER ; D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
48.	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN ; S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA ; S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA ; S-1 REKAYASA KEOLAHRAGAAN ; S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | BIDANG OLAHRAGA
49.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	7	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR | BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
50.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV REKAYASA MESIN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG TANGGAP DARURAT DAN BINA JASA KONSTRUKSI
51.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV DESAIN INTERIOR ; D-IV INSTRUMENTASI KONTROL INDUSTRI ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV MANUFAKTUR ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERENCANAAN TATA	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG CIPTA KARYA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		RUANG DAN PERTANAHAN ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV PROSES MANUFAKTUR ; D-IV REKAYASA ELEKTRO ; D-IV REKAYASA FISIKA ; D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA ; D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV REKAYASA MESIN ; D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK ; D-IV REKAYASA SIPIL ; D-IV REKAYASA TEKNOLOGI MANUFAKTUR ; S-1 ARSITEKTUR		
52.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
53.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI, DAN PELAPORAN
54.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
55.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
56.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN ; D-IV KIMIA TERAPAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 BIOLOGI ; S-1 FISIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 KIMIA ; S-1 REKAYASA FISIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA | UPTD BALAI LATIHAN KERJA-DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA | SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI LATIHAN KERJA
57.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, MUTASI DAN PENSIUN
58.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN ; D-IV KIMIA TERAPAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 BIOLOGI ; S-1 FISIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 KIMIA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 REKAYASA FISIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KIMIA ; S-1 REKAYASA MESIN ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
59.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV BIOTEKNOLOGI PERIKANAN ; D-IV KIMIA TERAPAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA | BIDANG KOPERASI DAN UMKM
60.	PENATA KEPROTOKOLAN	D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SASTRA JEPANG	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
61.	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG TATA RUANG
62.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI ; SMK INSTRUMENTASI LOGAM ; SMK DESAIN GAMBAR MESIN ; SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN ; SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG BINA MARGA
63.	PENGAMAT TERA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK TEKNIK	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				BIDANG PERDAGANGAN
64.	PENGAMAT TERA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III METROLOGI DAN INSTRUMENTASI ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III TEKNOLOGI INDUSTRI ; D-III TEKNOLOGI INSTRUMENTASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI LISTRIK ; D-III TEKNOLOGI MESIN ; D-III TEKNOLOGI OTOMASI ; D-III TEKNOLOGI SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN
65.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF ; D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA ; D-IV BISNIS DIGITAL ; D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA ; D-IV PENGELOLAAN AGRIBISNIS ; D-IV PENGELOLAAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN ; D-IV PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI ; D-IV PENGELOLAAN PERTANIAN LAHAN KERING ; S-1 BIO KEWIRAUSAHAAN ; S-1 BISNIS DIGITAL ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 USAHA KOPERASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA | BIDANG KETENAGAKERJAAN
66.	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV MEKANISASI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
67.	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV MEKANISASI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNIK MESIN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG PRASARANA DAN SARANA
68.	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM SYARIAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINUSTRIAN
69.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 USAHA KOPERASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA | BIDANG KOPERASI DAN UMKM
70.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV AGRO BISNIS ; D-IV PERTANIAN ; D-IV PETERNAKAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG PRASARANA DAN SARANA
71.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	7	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
72.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI ; S-1 AKUNTANSI	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
73.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
74.	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 FISIKA ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERDAGANGAN
75.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI ; S-1 TRANSPORTASI ; D-IV REKAYASA SISTEM TRANSPORTASI JALAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN
76.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III TATA HIDANG ; D-III KOMUNIKASI MASSA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
77.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SOSIOLOGI PEDESAAN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				PERLINDUNGAN ANAK
78.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV BISNIS DIGITAL ; D-IV INTELIJEN TEKNOLOGI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM ; S-1 EKONOMI SYARIAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
79.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | SUB BIDANG PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
80.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 BIOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH
81.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 FISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 GEOLOGI ; S-1 HORTIKULTURA ; S-1 HUKUM ; S-1 HUMANIORA ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 KIMIA ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALI DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN
82.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 FISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 HORTIKULTURA ; S-1 HUKUM ; S-1 HUMANIORA ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 ILMU KEDOKTERAN HEWAN ; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
83.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 FISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 GEOLOGI ; S-1 HORTIKULTURA ; S-1 HUKUM ; S-1 HUMANIORA ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 ILMU KEDOKTERAN HEWAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH ; S-1 KEDOKTERAN HEWAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KIMIA ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 PEMULIAAN TANAMAN ; S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN ; S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI ; S-1 SANITASI LINGKUNGAN ; S-1 SOSIAL ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOFISIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
84.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL	D-III KIMIA ; D-III PSIKOLOGI MASYARAKAT ; D-III BIOLOGI ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ; D-III ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH
85.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 BIOLOGI ; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG TANAMAN PANGAN
86.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PEMULA	SMA IPA ; SMK PERTANIAN ; SPMA SEDERAJAT	10	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG TANAMAN PANGAN
87.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TERAMPIL	D-III AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; D-III AGRONOMI ; D-III BIOLOGI ; D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; D-III PERLINDUNGAN TANAMAN ; D-III PROTEKSI TANAMAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG TANAMAN PANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
88.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 BIOKIMIA ; S-1 BIOKIMIA NUTRISI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BIOLOGI TERAPAN ; S-1 EKOLOGI ; S-1 FISIOLOGI ; S-1 ILMU BIOLOGI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN ; S-1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KIMIA ; S-1 MIKROBIOLOGI ; S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
89.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ILMU PERIKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG PERINUSTRIAN
90.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV KESEHATAN HEWAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; D-IV PETERNAKAN ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS ; S-1 MANAJEMEN PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN PRODUKSI PERKEBUNAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN ; S-1 MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK ; S-1 PEMULIAAN DAN PRODUKSI TERNAK ; S-1 PEMULIAAN TANAMAN ; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING ; S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN ; S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN ; S-1 TEKNOLOGI PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK	10	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG PENYULUH
91.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III AGRIBISNIS ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III AGRONOMI ; D-III AGROTEKNOLOGI ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; D-III ILMU TANAH ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN ; D-III MANAJEMEN AGROBISNIS ; D-III MEKANISASI PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN PERTANIAN ; D-III PETERNAKAN ; D-III TEKNIK PERTANIAN ; D-III PROTEKSI TANAMAN ; D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
92.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III AGRIBISNIS ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III AGRONOMI ; D-III AGROTEKNOLOGI ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; D-III ILMU TANAH ; D-III MANAJEMEN AGROBISNIS ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN ; D-III MEKANISASI PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN PERTANIAN ; D-III PERKEBUNAN ; D-III PETERNAKAN ; D-III PROTEKSI TANAMAN ; D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-III TANAMAN PANGAN ; D-III TEKNIK PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | BIDANG PENYULUH
93.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
94.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
95.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; D-IV AGRIBISNIS PANGAN ; D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN ; D-IV AGRIBISNIS UNGGAS ; D-IV AGROINDUSTRI KOPI ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1	4	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AGAMA ISLAM ; S-1 KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ; S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL ; S-1 MANAJEMEN DAKWAH ISLAM ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN HUTAN ; S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ; S-1 MANAJEMEN SYARIAH ; S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI ; S-1 PARIWISATA ; S-1 PARIWISATA DAN KEAGAMAAN ; S-1 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; S-1 PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN BISNIS ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ; S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR ; S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN JASMANI ; S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA ; S-1 PENDIDIKAN KIMIA ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN KRIYA ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN MUSIK ; S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ; S-1 PENDIDIKAN SEJARAH ; S-1 PENDIDIKAN SENI RUPA ; S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TARBIYAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM		
96.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	SLTA/SMA SEDERAJAT	5	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR | BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
97.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG ANGGARAN
98.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | SEKRETARIAT | SUB BANGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
99.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA
100.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PEREBENDAHARAAN
101.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER		
102.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SAINS KOMPUTASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT
103.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF ; D-IV SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS ; D-IV SISTEM SIBER-FISIK ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
104.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN ; D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
105.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III PERANCANGAN PERMAINAN ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | SEKRETARIAT | SUB BANGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
106.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III PERANCANGAN PERMAINAN ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
107.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III PERANCANGAN PERMAINAN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
108.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
109.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III PERANCANGAN PERMAINAN ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
110.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III PERANCANGAN PERMAINAN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PENANAMAN MODAL
111.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | INSPEKTORAT | SEKRETARIS | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
112.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III PERANCANGAN PERMAINAN ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI		PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
113.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III PERANCANGAN PERMAINAN ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN KOPETENSI APARATUR
114.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PERPUSTAKAAN
115.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, MUTASI DAN PENSIUN
116.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	3	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PERPUSTAKAAN
117.	SANDIMAN AHLI PERTAMA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; D-IV REKAYASA KRIPTOGRAFI ; D-IV REKAYASA PERANGKAT KERAS KRIPTOGRAFI ; D-IV TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN ; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SAINS DATA ; S-1 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI | SEKRETARIS DAERAH | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb